

LAPORAN
STUDIO AKHIR ARSITEKTUR

**PERENCANAAN KANTOR BUPATI DENGAN PENDEKATAN *INSTITUTIONAL DESIGN* DI PUSAT PEMERINTAHAN BARU
KABUPATEN AGAM TUO NAGARI BALINGKA**



Dosen Koordinator:

Dr. Jonny Wongso, S.T., M.T

Ir. Nasril Sikumbang, M.T

Duddy Fajriansyah, S.T., M.T

Dosen Pembimbing :

Dr. I Nengah Tela, S.T., M.Sc

Dr. Al Busyra Fuadi, S.T., M.Sc

Disusun oleh:

Idul Febrianda

2110015111037

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024/2025



LAPORAN STUDIO AKHIR ARSITEKTUR

SEMESTER GENAP 2024/2025

JUDUL

Perancangan Kantor Bupati dengan Pendekatan *Institutional Design* di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo Nagari Balingka

KETUA & WAKIL KOORDINATOR :

Ir. Nasril Sikumbang, M.T., IAI

Duddy Fajriansyah, S.T., M.T.

DOSEN PEMBIMBING

Dr. I Nengah Tela., S.T., M.Sc.

Dr. Al Busyra Fuadi., S.T., M.Sc.

MAHASISWA :

IDUL FEBRIANDA

2110015111037



PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024/2025 PADANG

LEMBAR PENGESAHAN
STUDIO AKHIR ARSITEKTUR
SEMESTER GENAP TAHUN 2024-2025

Judul :
**Perancangan Kantor Bupati dengan Pendekatan *Institutional Design* di Pusat Pemerintahan Baru
Kabupaten Agam Tuo Nagari Balingka**

Oleh :
IDUL FEBRIANDA
2110015111037

Padang, 11 Agustus, 2025
Disetujui oleh :

Pembimbing I


Dr. I Nengah Tela., S.T., M.Sc.
(NIDN : 1007036601)

Ketua Program Studi Arsitektur

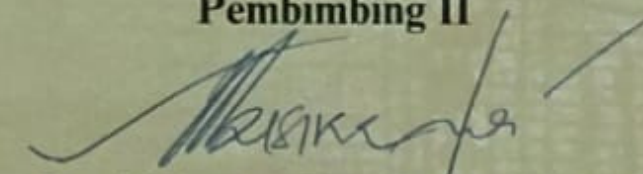


Ir. Nasril Sikumbang, M.T., IAI
(NIDN : 0003026302)

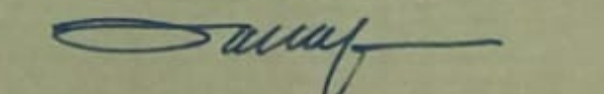
Mengetahui :



Pembimbing II


Dr. Al Busyra Fuadi, S.T., M.Sc.
(NIDN : 1016018102)

Wakil Koordinator Studio Akhir Arsitektur


Duddy Fajriansyah, S.T., M.T.
(NIDN : 1023068001)

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024/2025 PADANG

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR ARSITEKTUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idul Febrianda
NPM : 2110015111037
Program Studi : Arsitektur

Dengan sejujur - jujurnya saya menyatakan bahwa hasil pekerjaan Studio Akhir Arsitektur dengan judul :

Perancangan Kantor Bupati dengan Pendekatan *Institutional Design* di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo Nagari Balingka

Merupakan hasil karya yang dibuat sendiri, bukan jiplakan dari Tugas Akhir atau karya tulis atau studio akhir arsitektur orang lain, dengan menjunjung tinggi kode - etik akademik dilingkungan ilmiah dan almamater, jika kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan di atas, penulis bersedia untuk mempertanggung jawabkannya.

Padang, 11 Agustus 2025


10000
METERAL
TEMPEL
E40FEANX006561902

Idul Febrianda

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Seminar Arsitektur dengan judul **“Perancangan Kantor Bupati Dengan Pendekatan *Institutional Design* di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo Nagari Balingka”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Seminar ini tidak lepas dari berbagai dukungan, saran, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang berpengaruh dalam penyusunan Laporan Seminar ini. Penulis juga menyadari bahwa Laporan Seminar ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap untuk menerima masukan yang konstruktif dari dosen pembimbing agar Laporan Seminar ini dapat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas Laporan Studio Akhir Arsitektur.
2. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika., sebagai Rektor Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Rini Mulyani, S.T., M.Sc. (Eng). selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Ir.Nasril S. M.T., IAI. sebagai Ketua Program Studi Arsitektur
5. Bapak Dr. Jonny Wongso S.T., M.T, Bapak Duddy Fajriansyah, S.T.,M.A dan Bapak Ir.Nasril S. M.T., IAI, sebagai Dosen Koordinator mata kuliah Seminar Arsitektur
6. Bapak Dr. I Nengah Tella, S.T., M.Sc dan Bapak Dr. Al Busyra Fuadi S.T., M.Sc sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan laporan ini
7. Staff Pengajar, selaku Dosen Penguji yang memberikan dukungan selama proses pembuatan Tugas Akhir dan selama masa perkuliahan
8. Bapak/Ibu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data penting sehingga membantu dalam penyusunan Laporan Seminar Arsitektur ini

9. Bapak Sujito dan almh. Ibu Neti selaku kedua orang tua penulis yang telah membesarkan serta mendidik penulis dengan sepenuh hati dan keluarga besar penulis (Sarwoadi, Sumini,S.E, Neki Sarwoni,S.P dan Nika Julianti) sebagai abang dan kakak penulis yang berperan penting dalam penyelesaian Laporan Seminar Arsitektur dengan selalu memberikan semangat, doa dan dukungan dalam segala hal apapun
10. Teman-teman Arsitektur 21 (FUNART) dan teman teman terdekat yang mendukung serta membantu selama proses penyusunan Laporan Seminar ini
11. Yang terakhir ucapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri karna telah menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Arsitektur ini dengan sepenuh hati.

Sebagai hasilnya, penulis menyusun laporan ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei dan wawancara di lapangan. Penulis menyadari adanya banyak kesalahan dalam penyusunan dan penulisan laporan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi masyarakat serta bagi penulis sendiri sebagai referensi di masa mendatang. Amin Ya Rabbal’aalamin.

Padang, 11 Agustus 2025
Penulis

Idul Febrianda
2110015111037

ABSTRAK

Pemekaran Kabupaten Agam yang akan dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Agam dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo menjadi isu yang menarik beberapa tahun terakhir diprovinsi Sumatra Barat dan sudah masuk tahap akhir. Alasan kuat dalam proses pemekaran DOB ini yaitu jauhnya akses masyarakat yang berada di Kabupaten Agam bagian timur untuk menjangkau pusat pemerintahan Kabupaten Agam sehingga muncul aspirasi masyarakat untuk pemekaran kabupaten. Pusat pemerintahan untuk DOB Kabupaten Agam Tuo akan direncanakan di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto dengan luas perencanaan Masterplan yaitu 39 Ha, dalam perencanaan Masterplan terdiri dari beberapa kantor dinas penunjang pemerintahan termasuk kantor bupati, rumah dinas serta masjid sebagai simbol keagamaan. Penelitian ini membahas tentang perancangan kantor bupati, rumah dinas dan masjid dengan pendekatan *Institutional Design*. Dalam konsep masterplan yang dipakai adalah tigo tungku sajarangan yang merupakan konsep budaya khas Sumatra Barat, kantor bupati melambangkan niniak mamak serta masjid melambanga alim ulama. Konsep *Institutional Design* yang digunakan untuk menyeimbangkan konsep awal dengan tidak hanya menghasilkan bangunan yang fungsional tetapi memperlihatkan identitas lokal, efisiensi pelayanan publik dan berkelanjutan yang diharapkan mampu mendukung pemerintahan yang lebih inklusif, representative dan berorientasi pada masa depan.

Kata Kunci: Kantor Bupati, Rumah Dinas, Daerah Otonomi Baru, Institutional design

ABSTRACT

The expansion of Agam Regency which will be divided into two regencies namely Agam Regency and the New Autonomous Region (DOB) of Agam Tuo Regency has become an interesting issue in recent years in West Sumatra Province and has entered the final stage. The strong reason for the process of expanding this DOB is the distance of access for the community in the eastern part of Agam Regency to reach the center of Agam Regency government so that the community's aspirations for the expansion of the district have emerged. The center of government for the DOB of Agam Tuo Regency will be planned in Nagari Balingka, IV Koto District with a Masterplan planning area of 39 Ha, in the Masterplan planning it consists of several government support agencies including the regent's office, official residence and mosque as a religious symbol. This study discusses the design of the regent's office, official residence and mosque with an Institutional Design approach. In the masterplan concept used is the tigo teras sajarangan which is a typical West Sumatra cultural concept, the regent's office symbolizes the niniak mamak and the mosque symbolizes the alim ulama. The Institutional Design concept is used to balance the initial concept by not only producing a functional building but also showing local identity, efficiency of public services and sustainability which is expected to be able to support a more inclusive, representative and future-oriented government.

Keywords: Regent's Office, Official Residence, New Autonomous Region, Institutional Design

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii	2.1.8. Alur Protokoler Rumah Dinas	12
DAFTAR GAMBAR.....	v	2.1.9. Pengertian dan Fungsi Masjid	13
BAB I.....	1	2.2 Tinjauan Teori	13
PENDAHULUAN.....	1	2.2.1 Klasifikasi Bangunan Gedung Negara	13
1.1 Latar Belakang	1	2.2.2 Teori Tata Ruang Kantor.....	18
1.1.1 Isu dan Permasalahan	2	2.2.3 Pola Tataanan Ruang	19
1.1.2 Data dan Fakta	3	2.2.4 Teori Sirkulasi Kantor	20
1.2 Rumusan Masalah.....	6	2.2.5 Teori Pola Kegiatan Kantor Bupati	20
1.2.1 Permasalahan Non Arsitektural.....	6	2.2.6 Teori Rumah Dinas	21
1.2.2 Permaslah Arsitektural	6	2.2.7 Teori Masjid	21
1.3 Tujuan Penelitian	6	2.3 Tinjauan Tema	22
1.4 Sasaran Penelitian	6	2.3.1 Institusional	22
1.5 Manfaat Penelitian	6	2.3.2 Futuristik Desain	25
1.5.1 Manfaat Teoritis	6	2.4 Riview Jurnal	25
1.5.2 Manfaat Paraktis	7	2.4.1 Jurnal Nasional	25
1.6 Ruang Lingkup Pembahasan	7	2.4.2 Jurnal Internasional	27
1.6.1 Ruang Lingkup Spasial (Kawasan)	7	2.4.3 Kriteria Desain	29
1.6.2 Ruang Lingkup Subtansial (Kegiatan)	7	2.4.4 Tanggapan Kriteria Desain.....	29
1.7 Ide Kebaruan.....	7	2.5 Studi Preseden Bangunan	30
1.8 Keaslian Penelitian	8	2.5.1 Prinsip Desain	41
1.9 Sistimatika Pembahasan	8	2.5.2 Tanggapan Prinsip Desain.....	41
BAB II	10	BAB III.....	41
TINJAUAN PUSTAKA	10	METODE PENELITIAN	41
2.1 Tinjauan Umum	10	3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
2.1.1. Pengertian Daerah Otonomi Baru (DOB)	10	3.2 Sumber Data Yang di Proleh	41
2.1.2. Pengertian Pusat Pemerintahan	10	3.3 Jenis Data.....	42
2.1.3. Pengertian Gedung Negara	10	3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
2.1.4. Pengertian dan Fungsi Kantor	10	3.5 Teknik Pengolahan Data.....	42
2.1.5. Kualitas Pelayanan Kantor Terpadu	11	3.6 Perencanaan Penelitian	43
2.1.6. Pengertian Kantor Bupati	11	3.7 Jadwal Penelitian	43
2.1.7. Pengertian dan Fungsi Rumah Dinas	12	3.8 Kriteria Lokasi	43
		3.9 Lokasi Site	44
		BAB IV	44
		TINJAUAN KAWASAN PERENCANAAN	44

4.1	Deskripsi Kawasan	44
4.2	Potensi Kawasan	45
4.3	Permasalahan Kawasan.....	45
4.4	Analisa MasterPlan	45
4.4.1	Analisa Kawasan	45
4.4.2	Konsep Kawasan	46
4.5	Konsep MasterPlan	49
4.6	Deskripsi Tapak	50
4.6.1	Lokasi	50
4.6.2	Tautan Lingkungan.....	50
4.6.3	Ukuran dan Tata Wilayah.....	50
4.6.4	Peraturan	52
4.6.5	Kondisi Fisik Alami	52
4.6.6	Kondisi Fisik Buatan	54
4.6.7	Sirkulasi	54
4.6.8	Utilitas	55
4.6.9	Pancaindra	56
4.6.10	Iklim	57
4.6.11	Manusia dan Budaya	57
BAB V		58
ANALISA		58
5.1	Analisa Ruang Luar	58
5.1.1	Analisa Pancaindra Terhadap Tapak	58
5.1.2	Analisa Iklim	59
5.1.3	Analisa Aksesibilitas dan Sirkulasi	60
5.1.4	Analisa Vegetasi Alami	61
5.1.5	Analisa Utilitas	62
5.1.6	Analisa kontur	63
5.1.7	Analisa Superimpose	64
5.1.8	Zoning Makro	66
5.2	Analisa Ruang Dalam	66
5.2.1	Data Fungsi.....	66
5.2.2	Analisa Programatik	66
5.2.3	Analisa Kegiatan.....	68

5.2.4	Analisa Kebutuhan Ruang.....	71
5.2.5	Analisa Besaran Ruang	73
5.2.6	Analisa Kebutuhan Parkir	78
5.2.7	Analisa Hubungan Ruang.....	78
5.2.8	Organisasi Ruang	80
5.2.9	Zoning Mikro	81
5.3	Analisa Bangunan.....	81
5.3.1	Analisa Bentuk dan Massa Bangunan	81
5.3.2	Analisa Struktur Bangunan	81
5.3.3	Analisa Utilitas Bangunan.....	84
BAB VI		86
KONSEP PERANCANGAN		86
6.1	Konsep Tapak	86
6.1.1	Konsep Pancaindra Terhadap Tapak.....	87
6.1.2	Konsep Iklim	88
6.1.3	Konsep Aksesibilitas dan Sirkulasi	89
6.1.4	Konsep Vegetasi Alami.....	89
6.1.5	Konsep Utilitas	90
6.2	Konsep Bangunan.....	90
6.2.1	Konsep Masa Bangunan.....	90
6.2.2	Konsep Ruang Dalam.....	90
6.2.3	Konsep Struktur Bangunan	91
6.2.4	Konsep Utilitas Bangunan.....	92
BAB VII		95
PERENCANAAN TAPAK		95
7.1	Site Plan.....	95
BAB VIII		96
PENUTUP		96
8.1	Kesimpulan.....	96
8.2	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Agam.....	3
Gambar 1. 2 Peta Pembagian Kabupaten Agam	5
Gambar 1. 3 Peta Nagari Balingka.....	7
Gambar 1. 4 Future Office	8
Gambar 2. 1 Struktur organisasi kantor bupati	12
Gambar 2. 2 Alur Protokoler Rumah Dinas.....	12
Gambar 2. 3 Standar Kebutuhan Ruang.....	22
Gambar 3. 1 Pembagian Blok	44
Gambar 3. 2 Site	44
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Agam.....	44
Gambar 4. 2 Struktur/Kontur Kawasan Perencanaan	45
Gambar 4. 3 Kawasan Perencanaan	46
Gambar 4. 4 Pembagian Zona Rencana	47
Gambar 4. 5 Pembagian Zona.....	48
Gambar 4. 6 Pembagian Blok Kawasan.....	48
Gambar 4. 7 Konsep Akseibilitas.....	48
Gambar 4. 8 Rencana MasterPlan.....	49
Gambar 4. 9 Peta Lokasi Site.....	50
Gambar 4. 10 Peta Tautan Lingkungan.....	50
Gambar 4. 11 Peta Site.....	51
Gambar 4. 12 Ilustrasi KLB dan KDB.....	52
Gambar 4. 13 Kodisi Fisik Alami	52
Gambar 4. 14 Kondidi Fisik Alami.....	52
Gambar 4. 15 Peta Kontur.....	53
Gambar 4. 16 Peta Kelerengan.....	53
Gambar 4. 17 3d Kontur.....	53
Gambar 4. 18 Potongan Kontur	53
Gambar 4. 19 Kondisi Fisik Alami	54
Gambar 4. 20 Kondisi Fisik Buatan.....	54
Gambar 4. 21 Kondisi Fisik Buatan.....	54

Gambar 4. 22 Kondisi Fisik Buatan.....	54
Gambar 4. 23 Sirkulasi	54
Gambar 4. 24 Potongan Jalan Primer	55
Gambar 4. 25 Potongan Jalan Sekunder	55
Gambar 4. 26 Sirkulasi	55
Gambar 4. 27 Utilitas.....	55
Gambar 4. 28 Utilitas.....	56
Gambar 4. 29 Pancaindra.....	56
Gambar 4. 30 Pancaindra.....	56
Gambar 4. 31 Pancaindra.....	57
Gambar 4. 32 Peta Kec. IV Koto	57
Gambar 4. 33 Peta Kec. IV Koto	57
Gambar 5. 1 Data View Tapak	58
Gambar 5. 2 Analisa dan Alternat View Tapak.....	58
Gambar 5. 3 Tanggapan View Tapak	58
Gambar 5. 4 Data Kebisingan Tapak.....	59
Gambar 5. 5 Analisa dan Alternatif Kebisingan Tapak.....	59
Gambar 5. 6 Tanggapan Kebisingan Tapak.....	59
Gambar 5. 7 Data Iklim	59
Gambar 5. 8 Analisa dan Alternatif Iklim	60
Gambar 5. 9 Tanggapan Iklim	60
Gambar 5. 10 Data Akseibilitas	60
Gambar 5. 11 Analisa dan Tanggapan Akseibilitas	61
Gambar 5. 12 Alternatif Akseibilitas	61
Gambar 5. 13 Peta Tananan Hijau	61
Gambar 5. 14 Vegetasi Alami.....	61
Gambar 5. 15 Analisa Vegetasi Alami	62
Gambar 5. 16 Alternatif Vegetasi Alami	62
Gambar 5. 17 Utilitas.....	62
Gambar 5. 18 Analisa Utilitas.....	62
Gambar 5. 19 Sistem Utilitas.....	63

Gambar 5. 20 Data Kontur	63
Gambar 5. 21 Analisa Kontur	63
Gambar 5. 22 Tanggapan Kontur.....	64
Gambar 5. 23 Superimpose	65
Gambar 5. 24 Zoning Makro.....	66
Gambar 5. 25 Struktur Organisasi Inti	66
Gambar 5. 26 Struktur Organisasi Asisten 1.....	67
Gambar 5. 27 Struktur Organisasi Asisten II.....	67
Gambar 5. 28 Struktur Organisasi Asisten III.....	67
Gambar 5. 29 Pelaku Kegiatan Rumah Dinas Bupati	67
Gambar 5. 30 Pelaku Kegiatan Rumah Dinas Wakil Bupati	67
Gambar 5. 31 Pelaku Kegiatan Rumah Dinas Wakil Bupati	68
Gambar 5. 32 Zoning Mikro	81
Gambar 5. 33 Pondasi Bore Pile	82
Gambar 5. 34 Sloof	82
Gambar 5. 35 Kolom.....	82
Gambar 5. 36 Dinding Kaca.....	83
Gambar 5. 37 Dinding Bata	83
Gambar 5. 38 GRC.....	83
Gambar 5. 39 Balok	83
Gambar 5. 40 Plat Lantai	83
Gambar 5. 41 Rangka Atap Baja Ringan.....	84
Gambar 5. 42 Sistim Jaringan Underground.....	84
Gambar 5. 43 Titik Air Bersih	84
Gambar 5. 44 Sistem Plumbing	85
Gambar 5. 45 Sistem Jaringan Telekomunikasi.....	85
Gambar 5. 46 Sistem Proteksi Kebakaran.....	85
Gambar 5. 47 Sistem Penangkal Petir.....	85
Gambar 5. 48 Sistem Jaringan Keamanan.....	86
Gambar 6. 1 Konsep Tapak.....	86
Gambar 6. 2 Konsep View	87

Gambar 6. 3 Konsep Kebisingan	88
Gambar 6. 4 Panel Rockwool	88
Gambar 6. 5 Glasswool.....	88
Gambar 6. 6 Konsep Iklim.....	88
Gambar 6. 7 Atrium	89
Gambar 6. 8 Secondary Skin	89
Gambar 6. 9 Konsep Aksesibilitas dan Sirkulasi	89
Gambar 6. 10 Konsep Vegetasi Alami	90
Gambar 6. 11 Konsep Utilitas.....	90
Gambar 6. 12 Konsep Utilitas.....	90
Gambar 6. 13 Konsep Massa Kantor	90
Gambar 6. 14 Konsep Ruang Kerja	91
Gambar 6. 15 Konsep Ruang Lobby	91
Gambar 6. 16 Konsep Ruang Masjid.....	91
Gambar 6. 17 Pondasi Bore Pile	91
Gambar 6. 18 Pondasi Plat.....	92
Gambar 6. 19 Kolom dan Balok	92
Gambar 6. 20 Struktur Tengah	92
Gambar 6. 21 Struktur Baja Ringan.....	92
Gambar 6. 22 Konsep Kelistrikan.....	93
Gambar 6. 23 Konsep Jaringan Air	93
Gambar 6. 24 Konsep Jaringan Telekomunikasi	93
Gambar 6. 25 Konsep Proteksi Kebakaran	93
Gambar 6. 26 Sistem Jaringan Keamanan	94
Gambar 6. 27 Konsep Penangkal Petir	94
Gambar 6. 28 Konsep Penghawaan AC Central.....	94
Gambar 6. 29 Konsep Penghawaan AC Split Wall.....	94
Gambar 7. 1 Alternatif 1 Site Plan.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dinas Pemerintahan	3
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pemerintahan	4
Tabel 1. 3 wilayah administratif Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo	5
Tabel 1. 4 wilayah administratif Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo	6
Tabel 1. 5 Tabel fasilitas Pendidikan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo	6
Tabel 2. 1 Kendaraan Dinas	17
Tabel 2. 2 Kendaraan Dinas	17
Tabel 2. 3 Kendaraan Dinas	17
Tabel 2. 4 Pola Tata Ruangan	19
Tabel 2. 5 Pola Sirkulasi Ruang	20
Tabel 2. 6 Jenis jenis koridor Ruang	20
Table 4. 3 Jenis Lampu	55
Table 5. 1 Analisa Pelaku Masjid	68
Table 5. 2 Analisa Kegiatan Struktur Inti	68
Table 5. 3 Analisa Kegiatan Asisten Satu	68
Table 5. 4 Analisa Kegiatan Asisten Dua	69
Table 5. 5 Analisa Kegiatan Asisten tiga	69
Table 5. 6 Analisa Kegiatan Staf Ahli dan Jabatan Fungsional	70
Table 5. 7 Analisa Kegiatan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati .	70
Table 5. 8 Analisa Kegiatan Rumah Dinas Sekda	71
Table 5. 9 Analisa Kegiatan Masjid	71
Table 5. 10 Analisa Kebutuhan Ruang Kantor Bupati	71
Table 5. 11 Analisa Kebutuhan Ruang Sekunder	72
Table 5. 12 Analisa Kebutuhan Ruang Rumah Dinas	72
Table 5. 13 Analisa Kebutuhan Ruang Masjid	72
Table 5. 14 Analisa Besaran Ruang Kantor Bupati	73
Table 5. 15 Analisa Besaran Ruang Rumah Dinas	75
Table 5. 16 Analisa Besaran Ruang Masjid	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan diadakan badan perwakilan daerah. Sejalan dengan kebijakan otonom daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan otonomi daerah itu mengharuskan setiap daerah untuk mampu berkembang secara mandiri, bertumbuh dari pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan alam yang dimilikinya secara cerdas dan bijaksana dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakatnya. (Isra et al., n.d.-a). Sumatera barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan luas 42.297,30 km², Sumatera barat memiliki 19 kabupaten atau kota dengan rincian 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan dan 1.265 desa.(Badan Pusat Statistik Sumatra Barat, 24 C.E.) . Kabupaten Agam adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Agam mempunyai wilayah yang terbentang mulai dari dataran tinggi sampai pesisir pantai. Sesuai Permendagri No 100.1.1-6117 tahun 2022 luas wilayah Kabupaten Agam mencapai 2.264,27 km², yang berada pada posisi 00° 01' 34"- 00° 28' 43" lintang selatan dan 99° 46' 39"-100° 32' 50" bujur timur. Adapun perbatasan administratif Kabupaten Agam yaitu, utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota, selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.(Sektoral & Agam, n.d.)

Daerah Otonomi Baru (DOB) secara resmi telah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2001. Pada dasarnya daerah otonomi baru merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam segala urusan, kecuali urusan mengenai pemerintah pusat. *(Tulisan-Hukum-PEMBENTUKAN-DAERAH-OTONOMI-*

BARU, n.d.). Tujuan dari pemekaran Daerah Otonomi Baru sangat penting dan tentunya telah mempertimbangkan banyak aspek, artinya karna dari pemekaran daerah tersebut tidak akan tercapai jika tidak disiapkan secara serius. Alhasil, masyarakat akan menerima pelayanan yang semakin buruk, birokrasi daerah tidak mampu memenuhi semua jenis layanan dan infrastruktur dasar tidak tersedia dengan baik.(Rizkika et al., 2023) .

Dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru tentunya harus memiliki seorang bupati dalam memimpin dalam suatu wilayah administratif kabupaten dan pusat pemerintahan atau ibukota baru serta harus memiliki sistem sarana dan prasarana terutama adalah Gedung pemerintahan sebagai tempat wakil rakyat yang akan mengatur pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB), sarana dan prasarana Gedung pemerintahan sebagai tempat wakil rakyat salah satunya adalah tempat Bupati menjalankan tugasnya. Bupati adalah sebutan untuk pemimpin kepala daerah wilayah administratif kabupaten di Indonesia. Pada dasarnya bupati memiliki tugas dan wewenang atas penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan bersama DPRD Kabupaten/Kota. Bupati memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan memelihara ketertiban masyarakat, Menyusun dan mengajukan RAPERDA tentang APBD, memimpin jalanya pemerintahan kabupaten, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang undangan, menetapkan peraturan daerah Bersama DPRD kabupaten.(Cerdika.com, 2023)

Dalam menjalankan kebijakan dan tugasnya, tentunya bupati memerlukan fasilitas berupa kantor atau gedung. Kantor Bupati merupakan tempat pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah administratif kabupaten yang akan menjadi tempat bupati dalam melaksanakan segala aktivitas dalam mengatur sebuah kabupaten. Selain kantor, seorang bupati juga membutuhkan sebuah fasilitas pendukung berupa rumah dinas untuk menunjang kegiatan bupati, rumah dinas tersebut nantinya yang akan menjadi tempat tinggal bagi seorang bupati selama masa jabatannya. (Ramadhan, 2024). Perencanaan kantor bupati di Ibukota Daerah Otonomi Baru kabupaten Agam Tuo akan direncanakan di kecamatan IV Koto, kantor bupati ini nantinya akan menjadi pusat pemerintahan dan pelayanan bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten Agam Tuo. Selain kantor bupati dan rumah dinas, pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru juga memerlukan sebuah masjid yang akan menjadi

salah satu landmark pada Kawasan tersebut. masjid ini nantinya akan dijadikan sebagai masjid utama pada Kawasan Daerah Otonomi Baru. (sumbar satu, 2024)

Dari penjelasan diatas, penelitian ini membahas tentang pembentukan pusat pemerintahan baru di Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten Agam Tuo. Pada pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) nantinya akan di rencanakan bangunan penunjang aktivitas pemerintahan sebagai pelayanan administratif bagi masyarakat, salah satunya adalah kantor bupati, rumah dinas bupati dan masjid kabupaten. Di setiap kabupaten pasti memiliki seorang bupati yang akan memimpin Kawasan administratif kabupaten tersebut, bupati juga memerlukan sebuah ruang untuk melakukan pekerjaan dalam mengatur pemerintahan kabupaten, pada setiap kantor bupati memiliki standar dan pelayanan yang sama di setiap kabupaten. Dengan melihat isu pemekaran kabupaten agam yang segera di mekarkan, maka penelitian ini dimaksud untuk mengangkat permasalahan dan kebutuhan fasilitas di Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo yang akan segera menjadi kabupaten baru di provinsi Sumatra barat. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menciptakan sebuah fasilitas yang dapat membantu kerja bupati dengan merencanakan kantor Bupati beserta rumah dinas dan masjid kabupaten di Daerah Otonomi Baru Agam tuo Provinsi Sumatra Barat.

1.1.1 Isu dan Permasalahan

Sejak tahun 1990 banyak sekali aspirasi masyarakat kabupaten Agam mengenai pemekaran kabupaten Agam, aspirasi itu sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di beberapa kecamatan termasuk kecamatan IV koto, kecamatan malalak, kecamatan baso, kecamatan sungai pua, kecamatan candung dan beberapa kecamatan lainnya. Selain itu, jauhnya akses menuju ke pusat pemerintahan kabupaten agam yang ada di lubuk basung menjadi keluhan bagi masyarakat sehingga banyak aspirasi muncul mengenai pemekaran kabupaten agam ini. (Yusrizal, 2024)

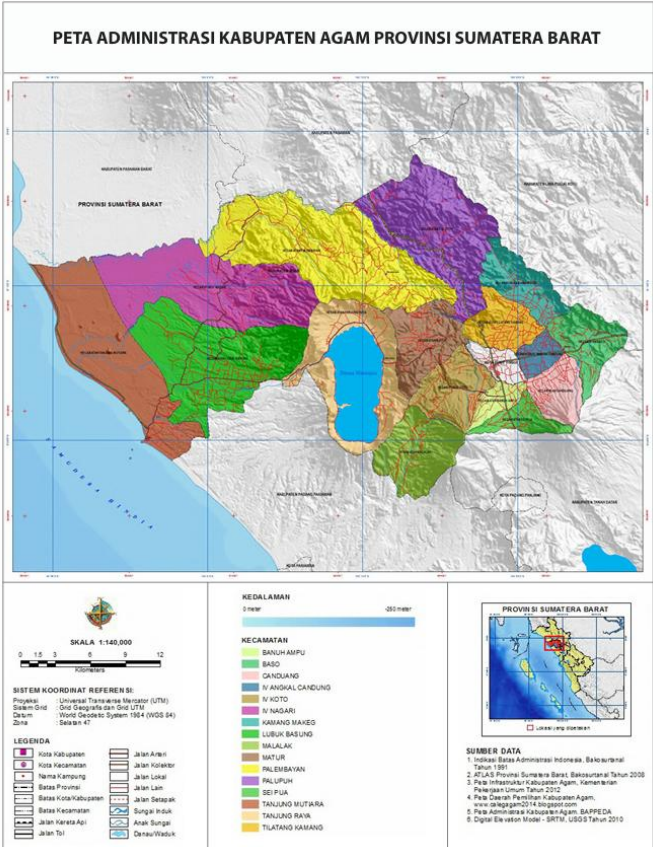
Dengan luasan lebih dari 5% Sumatera barat dan jangkauan dari beberapa daerah kabupaten menuju pusat kabupaten cukup jauh, maka kabupaten Agam masuk dalam wacana pemekaran kabupaten menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi Sumatra barat. Pemekaran kabupaten Agam ini sudah mendapatkan persetujuan oleh DPRD Agam dan pemerintah kabupaten Agam, dalam rapat paripurna DPRD Agam telah diambil keputusan

tentang persetujuan mengusulkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberi nama kabupaten Agam Tuo. Segala bentuk persyaratan sudah diajukan oleh bupati kabupaten Agam dan tinggal menunggu respon dari Pemerintah Provinsi serta gubernur Sumatra barat. Jika pemekaran ini terealisasi maka hasil pemekaran kabupaten Agam ini akan beribukota di kecamatan IV Koto, dengan terbentuknya ibukota kabupaten di kecamatan IV Koto, maka secara otomatis diperlukan pusat pemerintahan yang baru yang akan didukung dengan di rencanakannya Kantor Bupati Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam tuo. (Muhammad Fadillah, 2024)

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera barat mendukung secara penuh pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo. Dengan adanya rencana pembentukan kabupaten baru ini, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat yang tertinggal di kabupaten agam bisa lebih maksimal. Ketua Komisi I DPRD Sumatra Barat, Sawal mengatakan saat pertemuan dengan bupati Agam Andi Warman, pada jumat (4/5/2024) lalu mengatakan, rencana pembentuk DOB Agam Tuo telah lama diusulkan namun tidak ditindaklanjuti, sekarang dimasa kepemimpinan bupati Andi Warman dimunculkan lagi dan diharapkan bisa terealisasi.(DPRD Provinsi Sumatra Barat, 2024). Guna percepatan proses pemekaran Agam Tuo, Ketua DPRD Kabupaten Agam Dr. Novi Irwan, S.Pd, M.M bersama Komisi I DPRD Agam melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Sumatera Barat, Kamis (18/7). Pertemuan yang dilaksanakan di Istana Gubernur Sumbar tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Agam Aderia, SP, MM, Wakil Ketua Komisi I Ridwan Suhaili, M.Ed, Sekretaris Komisi M. Ater Dt. Manambun, Anggota Komisi I dan Sekretaris DPRD Agam Villa Erdi, S.Sos, MM, serta Sekretariat DPRD. Turut hadir Asisten I Pemprov Sumbar, Devi Kurnia, SH, MM, dan beberapa pejabat terkait. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Agam, menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan Gubernur yang tinggi terhadap pemekaran Agam Tuo, karena niatan untuk Daerah Otonomi Baru Agam Tuo sudah lama mengemuka, dengan tujuan peningkatkan pelayanan, percepatan pembangunan dan kemajuan masyarakat. (Humas DPRD Agam, 2024)

1.1.2 Data dan Fakta

Kabupaten Agam mempunyai wilayah yang terbentang mulai dari dataran tinggi sampai pesisir pantai. Sesuai Permendagri No 100.1.1-6117 tahun 2022 luas wilayah Kabupaten Agam mencapai 2.264,27 km2, yang berada pada posisi 00° 01' 34”- 00° 28' 43” lintang selatan dan 99° 46' 39”-100° 32' 50” bujur timur. Kecamatan Tanjung Mutiara menjadi titik wilayah terendah 0-500 mdpl dan Kecamatan Candung sebagai titik tertinggi diatas 1000 mdpl. Dengan luasan yang begitu besar dan geografis yang terletak di wilayah perbukitan, kemudian akses menuju pusat pemerintahan yang cukup jauh maka muncul isu atau aspirasi mengenai pemekaran kabupaten. (Sektoral & Agam, n.d.)



Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Agam

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Agam 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera barat merespon dengan baik aspirasi masyarakat Kabupaten Agam untuk mempercepat proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo dengan menurunkan tim kajian pemekaran daerah. Berdasarkan kesepakatan antara Bupati

Agam dengan DPRD Kabupaten Agam, ibukota Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo akan berlokasi di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto dengan luas pusat pemerintahan 39 Ha. (Yusrizal, 2024).

Berikut adalah dinas pemerintahan yang akan disediakan di Daerah Otonomi Baru Agam Tuo jika terealisasi, dinas pemerintahan ini disesuaikan dengan pemerintahan kabupaten agam saat ini yang sudah tertera:

Tabel 1. 1 Dinas Pemerintahan

No	Nama Dinas Pemerintahan
1.	Kantor Bupati
2.	Kantor Sekretariat DPRD
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Dinas Kesehatan
7.	Inspektorat Daerah
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
9.	Badan kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
10.	Dinas Sosial
11.	Badan Prencanaan dan Pembangunan Daerah
12.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14.	Badan Peenanggulangan Bencana Daerah
15.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
16.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19.	Dinas Pertanian
20.	Dinas Arsip dan Perpustakaan
21.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak
22.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
23.	Dinas Perhubungan
24.	Satuan Kepolisian Resort
25.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
26.	Dinas Pendapatan Daerah
27.	

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Agam 2024

Berdasarkan dinas pemerintahan kabupaten agam, terdapat beberapa penambahan dan pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil merupakan elemen utama yang menjalankan sistem suatu pemerintahan. Menurut data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam, pada tahun 2023 ada 6.639 PNS,

dengan rincian 5.412 PNS aktif dan 1.227 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pemerintahan

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun			
		2019/ 2020	2021	2022	2023/ 2024
1	Sekretariat Daerah	98	100	108	97
2	Sekretariat DPRD	23	22	22	21
3	Inspektorat	41	51	56	58
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	33	29	30	26
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	42	43	41	25
6	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	19
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30	33	40	35
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	19	20	17
9	Badan Penanggulangan Bencana daerah	33	28	29	30
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	153	123	104	102
	SLTP	963	875	780	680
	SD dan TK	2853	2718	2575	2416
	SKB Lasi	10	8	7	4
11	Dinas Kesehatan	63	55	52	66
12	Puskesmas	763	730	841	796
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	73	68	69	70
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	44	35	32
15	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	23	24	24	27
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	6
17	Dinas Lingkungan Hidup	38	36	30	31
18	Dinas Pertanian	133	125	123	111
19	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Ketenagakerjaan	36	32	31	19
20	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	42	36	37	32

21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	21	23	26	24
22	Dinas Sosial	19	21	20	20
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	28	26	27	22
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	90	84	84	76
25	Dinas Perhubungan	36	36	31	28
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35	30	26	22
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	20	20	20	19
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	18	21	19
29	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12	25	30	27
30	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	14	22	261	253
31	Tanjung Mutiara	12	9	11	10
32	Lubuk Basung	12	16	19	14
33	Ampek Nagari	11	12	14	15
34	Tanjung Raya	18	16	17	15
35	Matur	15	11	10	9
36	IV Koto	9	10	9	8
37	Malalak	8	9	11	7
38	Banuhampu	19	16	14	12
39	Sungai Pua	17	15	13	11
40	Ampek Angek	23	18	15	15
41	Canduang	19	15	13	10
42	Baso	15	13	11	11
43	Tilatang Kamang	22	22	18	13
44	Kamang Magek	12	13	15	13
45	Palembayan	14	9	10	9
46	Palupuh	14	12	12	10
47	PNS Tubel, Proses Penempatan, dan diperuntukan	-	-	-	-
JUMLAH		6.050	5.720	5.812	5.412
Terjadi penurunan jumlah pegawai dari tahun 2019/2020 hingga 2023/2024 sebesar 10,54%					

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Agam 2024

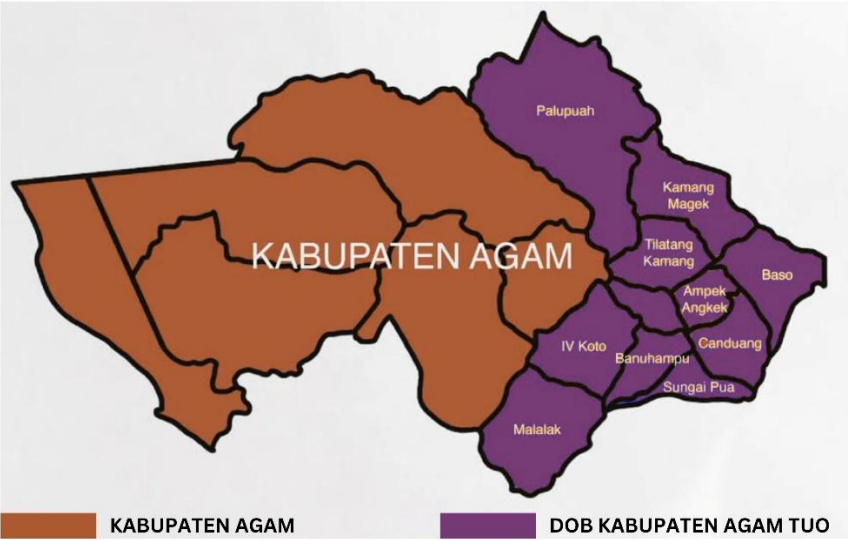
Dengan hasil pemekaran Kabupaten Agam maka akan terbentuk wilayah administratif baru yang akan menjadi wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo, berikut merupakan tabel yang akan menjadi wilayah administratif Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo.

Tabel 1. 3 wilayah administratif Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong	Jumlah Penduduk
1	Tilatang Kamang	95,86 Km2	Nagari Gadut	5	37.494 Jiwa
			Nagari Kapau	12	
			Nagari Kto Tengah	28	
2	Baso	70,3 Km2	Nagari Simarok	3	37.518 Jiwa
			Nagari Padang Tarok	7	
			Nagari Koto Tinggi	4	
			Nagari Koto Gadang	2	
			Nagari Tabek Panjang	3	
			Nagari Sungai Cubadak	1	
			Nagari Salo	3	
			Nagari Koto Baru	3	
3	Canduang	52,29 Km2	Nagari Canduang Koto Laweh	12	25.485 Jiwa
			Nagari Bukik Batambuah	4	
			Nagari Lasi	3	
4	Sungai Pua	37,83 Km2	Nagari Padang Laweh	4	27.179 Jiwa
			Nagari Sungai Pua	5	
			Nagari Batu Palano	5	
			Nagari Batagak	7	
			Nagari Sariak	7	
5	Ampek Angkek	30,66 Km2	Nagari Panampuang	7	44.949 Jiwa
			Nagari Biaro Gadang	6	
			Nagari Ampang Gadang	5	
			Nagari Batutaba	6	
			Nagari Lambah	3	
			Nagari Pasia	3	
			Nagari Balai Gurah	3	
6	Banuhampu	28,48 Km2	Nagari Padang Lua	3	38.244 Jiwa
			Nagari Sungai Tanang	3	
			Nagari Taluak Ampek Suku	3	
			Nagari Pakan Sinayan	10	
			Nagari Ladang Laweh	4	

7	Palupuah	235, 34 Km2	Nagari Cingkariang	6	15.525 Jiwa
			Nagari Kubang Putihah	14	
			Nagari Pagadih	5	
			Nagari Koto Rantang	4	
			Nagari Pasia Laweh	10	
			Nagari Nan Tujuh	6	
8	Malalak	104,49 Km2	Nagari Nan Limo	7	10.654 Jiwa
			Malalak Utara	4	
			Malalak Selatan	5	
			Malalak Timur	5	
9	Kamang Magek	99,61 Km2	Malalak Barat	4	22.181 Jiwa
			Nagari Magek	16	
			Nagari Hilia	17	
			Nagarikamang Mudiak	5	
			Nagari Pauh Kamang Mudiak	1	
10	IV Koto	68,72 Km2	Nagari Tangah Anam Suku	2	26.380 Jiwa
			Nagari Balingka	3	
			Nagari Guguak Tabek Sarajo	2	
			Nagari Koto Tuo	7	
			Nagari Koto Panjang	3	
			Nagari Koto Gadang	3	
			Nagari Sungai Landia	3	
			Nagari Anam Suku	3	

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Agam 2024



Gambar 1. 2 Peta Pembagian Kabupaten Agam

Sumber: https://www.instagram.com/langgam.id/p/C4zeGJxrOSZ/?img_index=1

Jumlah fasilitas kesehatan puskesmas yang ada di daerah calon otonomi baru Agam Tuo yaitu:

Tabel 1. 4 wilayah administratif Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas
1	Tilatang Kamang	1
2	Baso	1
3	Canduang	1
4	Sungai Pua	1
5	Ampek Angkek	1
6	Banuhampu	1
7	Palupua	0
8	Malalak	1
9	Kamang Magek	1
10	IV Koto	1

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Agam 2024

Jumlah fasilitas Pendidikan yang ada di daerah calon otonomi baru Agam Tuo yaitu:

Tabel 1. 5 Tabel fasilitas Pendidikan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo

No	Kecamatan	Jumlah Taman Kanak Kanak (Tk)	Jumlah Sekolah Dasar (Sd)	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (Smp)/Mts	Jumlah Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (Sma/K)/Ma
1	Tilatang Kamang	18	26	10	9
2	Baso	29	29	8	5
3	Canduang	21	17	8	4
4	Sungai Pua	10	15	6	3
5	Ampek Angkek	31	32	11	6
6	Banuhampu	14	24	6	5
7	Palupuh	18	19	5	1
8	Malalak	13	12	3	0
9	Kamang Magek	15	22	6	5
10	Iv Koto	17	23	5	5

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Agam 2024

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Permasalahan Non Arsitektural

- 1. Bagaimana menjadikan kantor bupati bisa menampung segala aspirasi masyarakat didaerah otonomi baru?
- 2. Bagaimana menciptakan sebuah pelayanan yang baik dikantor bupati untuk daerah otonomi baru?
- 3. Bagaimana kantor bupati bisa memberikan keseimbangan bagi masyarakat didaerah otonomi baru?

1.2.2 Permasalah Arsitektural

- 1. Bagaimana penataan Kawasan kantor bupati yang efisien, akuntabilitas, fleksibilitas dan transparan terhadap segala permasalahan sehingga bisa menjadikan kantor bupati sebagai tempat menampung segala aspirasi bagi masyarakat?
- 2. Bagaimana penataan pola ruang pada kantor bupati sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat?
- 3. Bagaimana mewujudkan kantor bupati yang kompleks dan berkelanjutan dimasa depan untuk menunjang segala kegiatan yang ada didalamnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu dan permasalahn yang dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan kantor bupati sebagai tempat penunjang kegiatan bupati dan pegawai bupati serta menciptakan Kawasan kantor bupati yang kompleks di Kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo.

1.4 Sasaran Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah bagaimana bisa merencanakan kantor bupati sebagai bangunan pemerintahan di Daerah Otonmi Baru (DOB) Agam Tuo, merencanakan kawasan yang kompleks bagi bupati dan pegawai bupati dalam menjalankan tugas dan kewajibanya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki 2 manfaat, diantaranya yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Adapun manfaat teoritis untuk peneliti lanjutan yaitu dapat digunakan sebagai referensi studi untuk peneliti lain terkait perencanaan kantor bupati yang nyaman, fleksibilitas dan kompleks dalam menunjang segala kegiatan bupati dan para pegawai bupati bagi Daerah Otonomi Baru (DOB).
- b. Adapun manfaat bagi penulis tentang penelitian ini yaitu sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan kantor bupati.

1.5.2 Manfaat Praktis

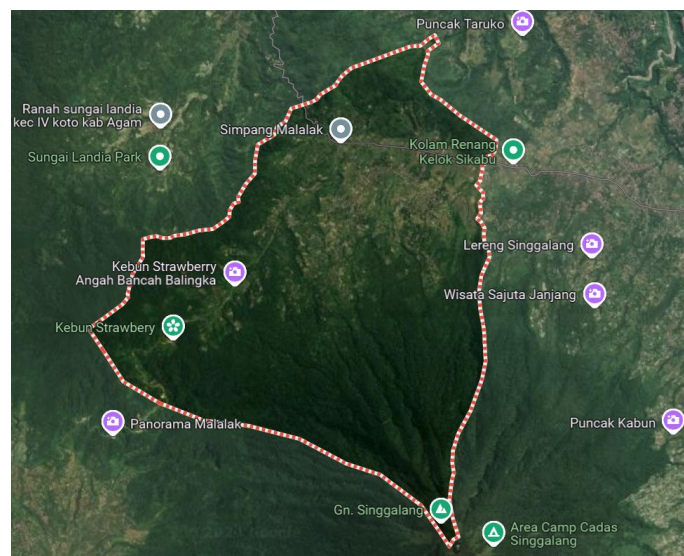
Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai arahan atau rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Agam dalam perencanaan kantor bupati jika pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo bisa terealisasi nantinya, dan tentunya harus mempertimbangkan aspek kenyamanan, fleksibilitas dan Kawasan kantor bupati yang kompleks.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1.6.1 Ruang Lingkup Spasial (Kawasan)

Ruang lingkup penelitian ini berada di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.



Gambar 1. 3 Peta Nagari Balingka

Sumber: Google Maps 2024

Batasan Nagari Balingka:

Barat	: Nagari Pahambatan
Timur	: Nagari Tanjung Sani
Utara	: Jorong Koto Hilalang
Selatan	: Nagari Malalak

Ruang lingkup penelitian ini berada di Nagari Balingka, Nagari Balingka berjarak 1 km dari ibukota kecamatan IV Koto, 56 km dari ibukota Kabupaten dan 95 km dari ibukota Provinsi Sumatra Barat. Adapun peruntukan lahan di Nagari Balingka yaitu, lahan persawahan, ladang, pekarangan, perkebunan, hutan, kolam dan padang penggembalaan. Fasilitas Pendidikan yang ada di Nagari Balingka yaitu, TK, SD, MTs, MA, dan MDA. Nagari Balingka juga memiliki fasilitas Kesehatan antara lain yaitu Puskesmas pembantu dan Polides. (Admin Palanta, 2020)

1.6.2 Ruang Lingkup Substansial (Kegiatan)

Ruang lingkup Substansial dalam penelitian ini membahas tentang:

1. Merencanakan pusat pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo.
2. Mewujudkan Kawasan kantor bupati di Daerah Otonomi Baru (DOB) Agam Tuo yang nyaman, fleksibilitas dan kompleks.
3. Menyelesaikan segala rumusan masalah yang ditetapkan
4. Melakukan analisis kebutuhan dan aktivitas pelaku
5. Melakukan survei lokasi sesuai ruang lingkup penelitian
6. Merumuskan konsep desain.

1.7 Ide Kebaruan

Dalam menghadapi perubahan global serta tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, sebuah kantor pemerintahan dituntut tidak hanya dipersiapkan dan digunakan untuk masa kini saja tetapi perlu memikirkan sebuah masa depan. Kantor masa depan (*future office*) atau kantor pemerintahan masa depan tidak hanya digunakan sebagai tempat administrasi tetapi berperan sebagai ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan. Sebuah desain kantor masa depan harus mengedepankan prinsip-prinsip tentang inklusivitas, keberlanjutan dan efisiensi yang didukung dengan teknologi, maka dari itu dapat meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan memperkuat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Desain kantor pemerintahan yang berorientasi untuk masa depan tidak hanya tentang estetika bangunan saja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang baik, responsive dan terbuka dengan cara menciptakan sebuah sarana kantor yang berkolaborasi dengan teknologi. Direktorat Jnedral Perbendaharaan (DJPb) telah menerapkan konsep ruang kantor masa depan dengan mengusung tema *Fleksible, Responsive, Smart dan Healty* atau lebih dikenal dengan sebutan *Fresh Office*. (Eko et al., n.d.)



Gambar 1. 4 Future Office

Sumber: <https://images.app.goo.gl/eEBWLXdqg15tLrWM7>

1.8 Keaslian Penelitian

No.	Universita s/Tugas Akhir	Nama	Tahun	Judul	Pembahasan
1	Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara	Macmuddin Muhammad	2023	Perencanaan Kantor Bupati Kabupaten Muna Barat Dengan Pendekatan Konsep Arsitektur Neo-Vernakular	Lokasi pembangunan Kantor Bupati Muna Barat telah ditetapkan di Jalan Bumi Praja Laworo, Desa Lakalamba, Kecamatan Sawirigadi. Perencanaan bangunan ini mengedepankan konsep arsitektur Neo-Vernakular, yang menggabungkan estetika modern dengan nilai-nilai tradisional khas Muna Barat. Tujuannya adalah menciptakan ruang kerja yang nyaman dan fungsional bagi para pegawai serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Dalam desainnya, akan

					diintegrasikan berbagai elemen arsitektur lokal seperti bentuk atap, ornamen, dan material bangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah
2	Universitas Halu Oleo Kendari	1. La Ode Ahmad Sahrayen S 2. Arman Faslih 3. Burhan Said 4. Alim Bahari	2024	Perencanaan Kantor Bupati Kabupaten Buton Selatan Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular	erencanaan Kantor Bupati Buton Selatan dengan konsep arsitektur Neo-Vernakular merupakan upaya untuk menciptakan bangunan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika, budaya, dan lingkungan. Dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan bangunan ini dapat menjadi ikon baru bagi Kabupaten Buton Selatan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

1.9 Sistimatika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami, penulisan tugas penelitian ini nantinya akan disusun sesuai dengan rangkaian kegiatan yang dibagi menjadi beberapa Bab dan Sub Bab sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab I berisi tentang pembahasan latar belakang, (isu, data dan fakta) rumusan masalah (non arsitektural dan arsitektural), tujuan penelitian, sasaran penelitian, manfaat penelitian, ide kebaruan, keaslian penelitian, ruang lingkup pembahasan, (special dan substansial) dan sistimatika pembahasan.
BAB II	TINJAUAN PUSAKA
	Bab II berisi tentang uraian tinjauan pusaka, baik yang bersumber dari media masa (berita), media cetak (buku dan koran), dan media elektronik seperti urnal yang terkait.
BAB III	METODE PENELITIAN

Bab III membahas tentang metode penelitian dan perencanaan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah.

BAB IV TINJAUAN KAWASAN PERENCANAAN

Bab IV membahas tentang data primer dan sekunder yang telah didapat. Data primer didapat dengan melakukan survey angsumg kelapangan dan data sekunder didapat dari media internet serta dinas dinas terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

BAB V ANALISA

Bab V membahas tentang Analisa tapak yang sudah diperoleh setelah melakukan survey lapangan.

BAB VI KONSEP PERENCANAAN

Bab VI membahas tentang gagasan dan ide konsep yang akan digunakan baik secara makro atau mikro dalam proses perencanaan.

BAB VII PERENCANAAN TAPAK

Bab VII membahas tentang perencanaan tapak yang didapat setelah melakukan survey dan analisa terhadap tapak serta menggunakan gagasan dan ide yang telah didapat pada bab sebelumnya.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII berisi tentang kesimpulan dari hasil latar belakang hingga konsep tapak dan bangunan yang sudah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN